



# **Tantangan Governansi Publik Di Era Disrupsi: Memperkuat Peran Etika Dalam Pembuatan Kebijakan**

**Teguh Kurniawan**

Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai  
**Guru Besar dalam Bidang *Public Governance***  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia  
Depok, 6 September 2023



# **Tantangan Governansi Publik Di Era Disrupsi: Memperkuat Peran Etika Dalam Pembuatan Kebijakan**

**Teguh Kurniawan**

Pidato pada Upacara Pengukuhan sebagai  
**Guru Besar dalam Bidang *Public Governance***  
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia  
Depok, 6 September 2023

**Bismillahirrahmanirrahim**  
**Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh**  
**Selamat Pagi**  
**Salam Sejahtera**  
**Om Swastiatu**  
**Namo Budaya**  
**Salam Kebajikan**  
**Salam Sehat untuk Kita Semua**

Yang terhormat,  
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia,  
Rektor, Wakil Rektor dan Sekretaris Universitas Indonesia,

Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia,

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia,

Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia,

Dekan, Wakil Dekan dan Jajaran Pimpinan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia,

Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia,

Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia,

Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia,

Direktur dan Wakil Direktur Sekolah di lingkungan Universitas Indonesia

Direktur dan Wakil Direktur Program Vokasi Universitas Indonesia,

Para Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia,

Para Guru Besar Tamu,

Para rekan sejawat Dosen, Mahasiswa dan Tenaga Kependidikan Universitas Indonesia,  
Para undangan, sanak saudara, sahabat, dan para hadirin yang Saya muliakan,

Pertama-tama, marilah kita memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia – Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Balai Sidang Universitas Indonesia - Kampus UI Depok dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti Upacara Pengukuhan Saya sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Public Governance atau Governansi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Selanjutnya, perkenankanlah Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah memberikan kepercayaan dengan mengangkat Saya sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Public Governance atau Governansi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan Bapak Rektor Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada Saya untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan dihadapan Sidang yang Terhormat. Ucapan terima kasih juga Saya sampaikan kepada Dekan FIA UI dan kepada Bapak/Ibu/Saudari/Saudari sekalian yang telah meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk dapat hadir dalam acara Pengukuhan ini.

**Hadirin yang Saya muliakan,**

Izinkanlah Saya pada kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Public Governance atau Governansi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dengan judul:

**“TANTANGAN GOVERNANSI PUBLIK DI ERA DISRUPSI: MEMPERKUAT PERAN ETIKA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN”**

**Hadirin yang Saya muliakan,**

Awal abad ke-21 ditandai dengan perkembangan teknologi digital yang sangat pesat seperti internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan perkembangan teknologi lainnya yang memicu disrupsi dan mengubah cara bisnis, industri dan masyarakat dalam beroperasi. Disrupsi merupakan suatu fenomena yang mengindikasikan perubahan dalam skala besar. Berbagai aspek memperoleh dampak dari perubahan tersebut, tak terkecuali governansi. Beradaptasi menjadi faktor signifikan yang diperlukan untuk menghadang berbagai tantangan era disrupsi untuk governansi seperti respon yang cerdas dan adaptif dimana Pemerintah harus memahami dampak dari kemajuan teknologi terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat secara menyeluruh termasuk dengan menye-

suaikan berbagai kebijakan yang mempromosikan inovasi tanpa meninggalkan siapapun.

Era disrupsi mengantarkan governansi pada titik puncak transformasi teknologi terbesar sejak Revolusi Industri, yang menyebabkan kompleksitas sosial dan politik yang signifikan. Transformasi ini akan mengancam kemampuan governansi untuk mempersiapkan society yang tidak memiliki keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kerapuhan (Clearly, 2018; Plekhanov, 2022). Jika pemerintah bersama dengan masyarakat dan sektor bisnis tidak cukup tanggap melihat peluang dan ancaman evolusi teknologi, maka negara tidak akan lepas dari kondisi pengangguran dan dislokasi sosial meningkat, demokrasi perwakilan akan kesulitan mewujudkan, dan ekpektasi warga negara terabaikan.

Evolusi teknologi dan informasi menjadi faktor utama yang mendorong disrupsi (Sood & Tellis, 2011; Kostoff & Simons, 2004). Teknologi akan mengubah cara pandang ekonomi dunia dan cara hidup manusia di masa depan, berbagai bentuk dampak yang akan dihasilkan pada aspek ekonomi dan sosial adalah dematerialisasi ekonomi, penurunan tekanan lingkungan, peningkatan efisiensi, pembentukan ekonomi solidaritas, pembentukan ekonomi sirkular, personalisasi konsumsi, sosialisasi pembangunan, pengurangan risiko kecelakaan dan bencana, peningkatan kesehatan dan kualitas hidup (Melnyk, dkk., 2019).

Merespon evolusi teknologi, mendorong governansi bersiap dalam bertransformasi dari entitas yang berdiri sendiri menjadi bagian dari ekosistem digital (dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik), sehingga mengambil porsi besar dalam perannya terhadap era disrupsi digital. Governansi yang agile dan dinamis sangat diharapkan terwujud guna mengimbangi perkembangan teknologi dan digitalisasi. Dampak seperti kemungkinan peralihan kekuasaan dan sumber daya diantara lapisan pemerintahan, yang juga mengubah hubungan sosial dan politik di masyarakat, serta fluktuasi ekonomi industri yang berpacu cepat, sangat mempengaruhi peran governansi. Hal ini dikarenakan, transformasi teknologi menghasilkan interkoneksi yang erat dengan lingkungan internal dan eksternal, keberhasilan transformasi sangat bergantung pada kemampuan governansi untuk mengarahkan dan memitigasi konflik yang mungkin timbul ditatanan masyarakat dan pelaku industri, ketika batasan menjadi kabur atau berubah akibat proses dari evolusi teknologi.

**Hadirin yang Saya muliakan,**

Disrupsi terjadi tidak hanya karena perkembangan teknologi, tetapi juga

akibat terjadinya perubahan pada aspek sosial, politik dan lingkungan hidup. Dalam aspek sosial misalnya, perubahan nilai dan preferensi masyarakat serta kemunculan generasi baru dengan pandangan dan kebiasaan yang berbeda tentu saja akan membawa kita kepada tuntutan untuk dapat menyesuaikan proses governansi dan pembuatan kebijakan publik yang selaras dengan situasi tersebut. Begitu juga dengan adanya perubahan iklim maupun krisis lingkungan yang menuntut sektor publik untuk dapat menyesuaikan diri dalam pelaksanaan governansi dan proses pembuatan kebijakan publiknya.

Terkait dengan upaya merespon disrupsi ini, sekitar 5 tahun silam, dalam Konferensi yang diselenggarakan oleh World Bank di Amerika Serikat menekankan bahwa di tengah-tengah disrupsi ini, cara mengukur ‘tata kelola atau governansi’ sebagian besar masih didasarkan pada pemahaman dua puluh lima tahun yang lalu (The World Bank, 2018). Sejatinya governansi harus dipahami sebagai enablers factor yang terkait dengan bagaimana mengaplikasikan konsep trust, legitimacy, leadership, dan social cohesion serta bagaimana dapat mengatasi berbagai governance constraints, seperti korupsi dan nepotisme, klientelisme, dan eksklusivitas. Oleh karena itu sebaiknya kedepan governansi dapat lebih merespon disrupsi dengan berorientasi pada cakupan hasil tindakan pemerintah dan memutakhirkan rancangan program reformasi sektor publik, seiring dengan perubahan dunia yang semakin dinamis.

Dalam kerangka governansi, titik tumpu yang mengambil peran penting adalah ‘negara’ dalam artian ini Pemerintah yang memegang peran paling diuji pada kondisi ekstrim dari gangguan era disrupsi. Hal ini didorong dari meningkatnya ketidakpastian tak terduga yang diproyeksikan menjadi konsekuensi yang dapat menggoyahkan tatanan tata kelola pemerintahan itu sendiri. Bias kontinuitas yang tertanam dalam tata kelola pemerintahan mengakui bahwa tantangan yang dibawa oleh era disrupsi dapat mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap ‘negara’ sebagai pihak yang berwenang dalam menangani ‘gangguan’ disrupsi dengan intensitas yang berbeda-beda.

Peran penting yang kemudian harus diambil oleh negara dalam merespon disrupsi adalah dengan melibatkan kombinasi strategi dan kebijakan yang proaktif dan holistik. Berbagai strategi dan kebijakan ini diharapkan dapat memperhatikan inovasi, fleksibilitas, pemberdayaan masyarakat, pemantapan jaringan sosial, perlindungan lingkungan, pelibatan pemangku kepentingan, serta perencanaan jangka panjang. Tantangannya kemudian adalah bagaimana memastikan proses governansi dan pembuatan kebijakan yang dapat meminimalisir pengaruh konflik kepentingan sehingga penyelenggaraan governansi

dan pembuatan kebijakan dapat berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak dibandingkan kepada kepentingan kelompok atau elit tertentu saja.

Memastikan proses governansi yang netral dan berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak merupakan hal yang penting dalam menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk tujuan tersebut, sejumlah langkah perlu dikedepankan dalam rangka meminimalisir konflik kepentingan pada proses governansi dan pembuatan kebijakan. Langkah-langkah tersebut diantaranya dengan terus mendorong transparansi dan keterbukaan sehingga proses pembuatan kebijakan dapat terbuka dan transparan serta senantiasa terpublikasi sehingga masyarakat umum dapat turut mengawasi dan mengikuti perkembangan yang terjadi. Selain itu, dengan terus mendorong pelibatan masyarakat atau publik dalam berbagai proses governansi dan pembuatan kebijakan. Serta dengan penguatan peran etika dan pencegahan konflik kepentingan bagi para pejabat pemerintah dan aktor-aktor yang terlibat dalam proses governansi dan pembuatan kebijakan.

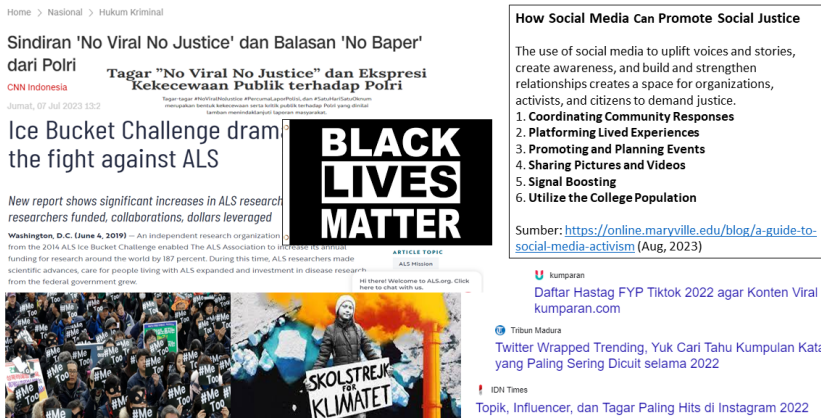
## Hadirin yang Saya muliakan,

Dalam hal pengawasan oleh masyarakat, maka perkembangan teknologi yang kian massif memberikan keterbukaan dan fasilitas luas untuk akses masyarakat melakukan pengawasan kepada Pemerintah. Pola pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah merupakan salah satu bentuk keterhubungan antar aktor dalam governansi. Masyarakat Indonesia pada rentang usia 16 – 64 tahun, menjadi 10 teratas masyarakat dunia yang menghabiskan waktu dalam sehari sekitar 3 – 4 jam untuk berselancar di media sosial (lihat gambar 1).



Gambar 1 : Penggunaan Media Sosial

Fenomena ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki masyarakat yang cenderung aktif menggunakan media sosial, dan tidak jarang media sosial menjadi wadah untuk melakukan tekanan dan menyampaikan ketidakpuasan masyarakat terhadap Pemerintah. Saat ini misalnya, jargon yang sering diutarakan oleh masyarakat dalam mengkritisi sistem peradilan di Indonesia adalah ‘no viral, no justice’ (lihat gambar 2). Berkaca dari fenomena tersebut, tanpa dirasakan masyarakat telah mengaplikasikan mekanisme pengawasan kebijakan pemerintah dengan menggunakan sesuatu yang hangat diperbincangkan atau sering disebut sebagai ‘viral based policy’. Indonesia menjadi salah satu negara yang saat ini gemar menggunakan viral based policy.



Gambar 2 : Fenomena Penggunaan Social Media yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Berkaca dari hal ini, telah menjadi penanda bagi organisasi publik untuk menetapkan strategi yang mencakup pemantauan komunikasi warga dan berbagi konten di media sosial (Mickoleit, 2014). Praktik pengawasan melalui media sosial yang dilakukan masyarakat, dapat di respon oleh Pemerintah dengan melakukan pengamatan dan analisis sistematis yang berkelanjutan terhadap jaringan media sosial dan komunitas sosial yang berada di lingkungan sosial. Misalnya di Belanda dan beberapa negara Eropa, pemantauan media sosial secara bertahap menjadi praktik umum di organisasi publik, khususnya di departemen nasional dan lembaga otonom. Oleh karena itu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui pemanfaatan perkembangan teknologi dapat dikategorikan esensial dan berdampak. Namun demikian, tidak hanya masyarakat yang men-



gawasi pemerintah, namun dengan teknologi ini pemerintah juga dapat melakukan pemantauan terhadap tren sosial dan politik yang berkembang.

Dengan demikian, etika masyarakat dalam menggunakan media sosial termasuk untuk tujuan pengawasan terhadap Pemerintah merupakan hal yang penting untuk dipastikan sehingga interaksi secara online dapat tetap sehat, bermakna dan menghormati hak dan privasi orang lain. Untuk itu, maka pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dalam penggunaan media online perlu terus digencarkan. Sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya ini diantaranya adalah terkait kejujuran, penghargaan terhadap privasi, empati serta pemberian informasi yang bermakna.

### **Hadirin yang Saya muliakan,**

Era disrupsi bagi Governansi selalu terkait juga dengan beberapa isu penting lainnya, seperti 1) perubahan iklim, 2) krisis geopolitik dan geoekonomi dan 3) kesehatan dunia. Dalam kesempatan ini, akan disampaikan highlight keterhubungan kebijakan dan governansi dalam studi kasus tersebut sebagai dampak dari era disrupsi.

Terkait isu penting pertama, perubahan iklim dianggap sebagai perubahan yang paling menakutkan karena dapat terjadi dalam skala besar dan sangat cepat, dan perubahan tersebut hampir tidak dapat dikendalikan. Berbagai peristiwa krisis iklim telah mengarahkan pada fenomena disrupsi seperti perubahan suhu udara harian, efek rumah kaca, tsunami, banjir dan gempa bumi. Kondisi tersebut pada titik ambang kritis sistem bumi dapat menyebabkan bencana yang berlanjut misalnya saja pada efek rumah kaca yang ujungnya dapat mendorong konversi hutan, menjebak karbon pada lahan kering sehingga memicu terjadi kebakaran hutan (Steffen, dkk, 2018). Pada kondisi ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk melakukan kendali pada hal tersebut, termasuk dengan melakukan advokasi terhadap berbagai inisiatif baik yang ada di masyarakat sehingga dapat berkembang dan berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim.

Selain itu, dampak yang dirasakan terhadap kebijakan pemerintah yang disebabkan perubahan ekstrim iklim adalah pada alokasi anggaran untuk bencana dan mengatasi keunggulan komparatif terkait sumber daya alam. Contoh kasus yang terdekat bagi kehidupan sehari-hari adalah krisis pangan karena panen gagal. Menurut Muchtar dkk (2022), krisis pangan dimulai dengan harga pangan yang naik, dilanjutkan dengan harga komoditas naik (terutama energi),

inflasi, ketersediaan pangan yg terbatas. Berdasarkan data kenaikan harga pangan secara global memiliki trend kenaikan nilai rata-rata hingga 45 % dari 2019 ke 2022 (FAO, 2023).

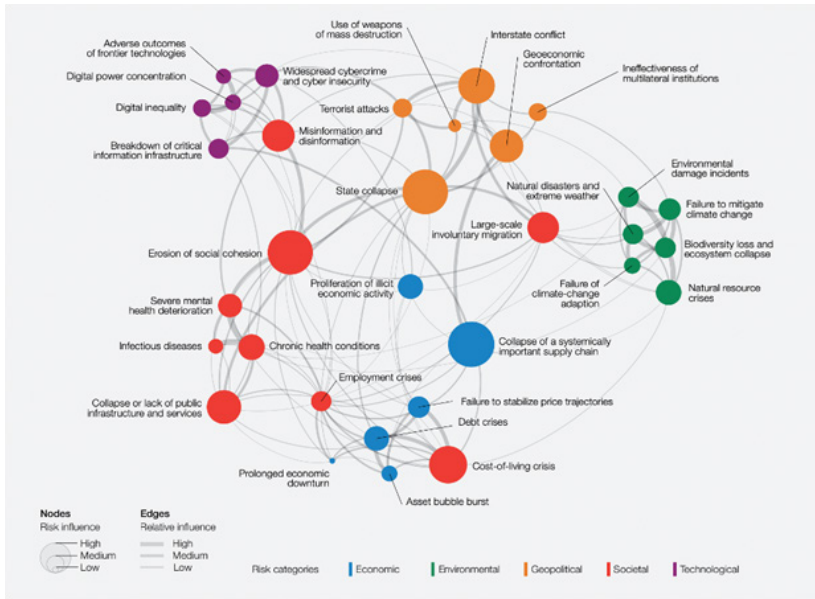
Kebijakan global perubahan iklim untuk governansi dapat dilakukan dengan cara ‘adaptasi perubahan iklim’, dalam laporan IPCC adaptasi terhadap perubahan kondisi telah terjadi setiap saat, namun perubahan iklim akan menciptakan tantangan baru bagi setiap lapisan masyarakat pemerintah dan sektor privat. Adaptasi terencana dan berkelanjutan terhadap perubahan iklim menjadi semakin penting, walaupun disadari bahwa proses adaptasi tidak mudah untuk dimulai dan dilaksanakan, karena berbagai faktor membatasi atau memfasilitasi adaptasi (misalnya guncangan eksternal mungkin memicu upaya adaptasi). Sepaham dengan pendapat Bauer, dkk (2012), menegaskan bawah hal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam ruang governansi dalam mengaplikasikan adaptasi perubahan iklim yaitu: 1) mengintegrasikan kebijakan adaptasi pada level horisontal dan vertikal (multi-level governance); 2) mengintegrasikan pengetahuan di laporan masyarakat; dan 3) melibatkan perasn serta penmangku kepentingan yang tergolong sebagai ‘non-state actor’. Ketiga hal ini perlu diperkuat dengan inovasi institusional yang mengarah kepada seni melakukan koordinasi dan kolaborasi yang persuasif dan strategis. Dengan demikian, Pemerintah memiliki peran penting dalam mendukung berjalannya kolaborasi dari berbagai inisiatif dan inovasi yang ada di masyarakat. Karenanya, governansi adalah juga sebuah cara yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan berbagai upaya penyelamatan lingkungan dengan memperkuat kolaborasi pada semua tingkatan.

Selanjutnya terkait isu penting kedua, krisis tatanan geopolitik dan geoeкономи menjadi salah satu guncangan yang dihasilkan dari era disrupsi untuk governansi. Krisis ini terjadi secara bersamaan dengan risiko-risiko yang saling berhubungan dan mengikis ketahanan suatu negara, menimbulkan risiko polikrisis, dimana krisis-krisis yang berbeda berinteraksi sedemikian rupa sehingga dampak keseluruhannya jauh melebihi jumlah dari masing-masing krisis yang ada (Lawrence, 2022).

Mengikisnya kerja sama geopolitik akan menimbulkan dampak yang beragam diseluruh lanskap risiko global dalam jangka menengah, termasuk berkontribusi terhadap potensi polikrisis risiko lingkungan, geopolitik, dan sosio-ekonomi yang saling terkait, misalnya dengan pasokan dan permintaan sumber daya alam. Potensi krisis ekonomi dan kemanusiaan dapat dipicu terpusat pada kekurangan pangan, air dan logam serta mineral (WEF, 2023). Tatanan lapisan masyarakat akan mulai dari perang air dan kelaparan hingga eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya ekologi dan perlambatan dalam mitigasi dan

adaptasi iklim.

Mengingat hubungan yang tidak pasti antara risiko-risiko global, tinjauan ke masa depan yang serupa dapat membantu mengantisipasi potensi krisis tersebut, mengarahkan langkah-langkah kesiapsiagaan untuk meminimalkan skala dampak dan ruang lingkup risiko dari krisis. Gambar 3 berikut mengilustrasikan kompleksitas global risiko dari krisis geopolitik dan geoeкономи yang terdapat dalam laporan World Economic Forum (WEF, 2023).



Gambar 3. Peta Risiko Global (Sumber: The World Economic Forum, 2023)

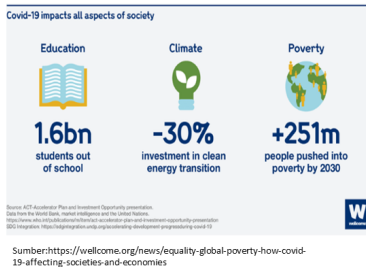
Kasus krisis geopolitik dan geoeкономи, misalnya kebijakan global yang perlu diambil menghadapi perang Rusia dan Ukraina. Berbagai negara mendapatkan implikasi terhadap pasokan energi, pangan, hal ini berkaitan dengan situasi peperangan tersebut, dapat lihat ada negara yang akhirnya mengambil jalan alternatif untuk mengimpor kebutuhan pasokan tersebut (Jagtap, dkk, 2022). Misalnya untuk negara India atau Tiongkok yang mulanya memiliki jalur supply chain melewati wilayah konflik Rusia dan Ukraina, mengharuskan untuk mengubah jalurnya. Governansi merespon kondisi krisis geopolitik dan geoekonomi dengan memperkuat kolaborasi dengan mitra regional. Dalam hal ini, Indonesia dapat memperkuat Kerjasama di berbagai bidang dengan negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik. Tentu fokus kolaborasi ‘proactive dan mu-

tualism' diperlukan dalam membangun aliansi dengan negara-negara lainnya.

Terkait isu penting ketiga, kesehatan dunia, empat tahun silam, dunia hampir tidak terprediksi menghadapi tantangan kompleksitas kesehatan yang terjadi dalam satuan waktu global bersamaan yaitu, ancaman penyakit yang menginfeksi dengan cepat atau penyakit menular yang mematikan. Pada akhirnya awal tahun 2020, dunia diguncangkan dengan tantangan kesehatan, COVID-19. Masa pandemi COVID-19 menimbulkan gangguan luar biasa terhadap kehidupan manusia di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Untuk membendung atau mengatasi tantangan COVID-19, negara-negara, baik besar maupun kecil, telah merespons dengan cara mereka masing-masing, yang dibentuk oleh kemampuannya negara itu sendiri dan bantuan internasional.

Dalam publikasi terbarunya mengenai *Rethinking Public Governance*, Torfing (2023) mengemukakan bahwa Pandemi COVID-19 semakin mempercepat transformasi governansi publik. Dipicu oleh krisis ini, sektor publik di seluruh dunia menurut Torfing telah banyak menghasilkan inovasi yang mengubah bentuk dan fungsi sistem administrasi dan penyediaan layanan kepada warga negara. Beberapa diantara inovasi tersebut mungkin menghilang seiring kembalinya keadaan normal, namun upaya proaktif untuk belajar dari bencana krisis dan mempertahankan praktik baru dan lebih baik akan membantu dalam menghasilkan dampak yang langgeng pada governansi publik.

Sejalan dengan pendapat Torfing, dalam mengelola krisis ini kebijakan beberapa negara ada yang efektif dan juga ada yang tidak efektif. Salah satunya dipengaruhi dengan ukuran, luas dan letak wilayah suatu negara (Bailey, 2021). Terlepas dari ukuran suatu negara, COVID-19 telah berdampak dalam berbagai cara, dilihat dari kerugian manusia, kerugian ekonomi, kerugian sosial, dan beberapa perspektif lainnya. Pada saat yang sama, krisis COVID-19 telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai banyak isu strategis dan mempunyai signifikansi global. COVID-19 telah menguji rantai pasokan dan produksi global, yang kini sangat bergantung pada Tiongkok. Hal ini juga menimbulkan perdebatan mengenai kebijakan industri di banyak negara yang mengikuti model pertumbuhan yang didorong oleh ekspor pada fase pasca-liberalisasi. Respon yang kuat terhadap krisis kompleks ini memerlukan perbaikan tata kelola sistem kesehatan – tentu saja di tingkat nasional yang diperkuat ketingkat lebih bawah yaitu daerah dan tingkat dunia. Selain itu COVID-19 akan memberikan dampak terhadap keseluruhan aspek sosial yaitu Pendidikan, iklim, dan keminisan sebagaimana dapat dilihat pada gambar 4.



### Policy Priorities for The Recovery Post Covid 19

Pursuit of the following priorities can help set countries on the path to a more equitable and sustained economic recovery:

- Mobilizing resources for the recovery.
- Safeguarding financial stability.
- Scaling back support in a transparent manner.
- Managing exposure to global economic risks that threaten an equitable recovery.
- Supporting the transition to a green economy.

Sumber: <https://thedocs.worldbank.org/>

**Policy in response to Covid-19 pandemic in Indonesia** : Combat rising inequality; Safeguard vulnerable households against uncertainty; Maintain seamless social assistance delivery, including through effective grievance mechanism; Promote better employment and business recovery; Address gender inequalities in domestic and unpaid care work; Mitigate against rising food insecurity; Recoup learning loss for children; Transition to the new normal by safeguarding the health of children and pregnant women; Support people with disability;  
 Sumber: <https://www.unicef.org/indonesia>

Gambar 4. Kebijakan Prioritas Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid-19

Signifikansi respon yang dihadapi oleh governansi untuk menetapkan kebijakan penanggulangan pandemik dihadapkan pada pilihan yang dilematis. Secara politik kebijakan negara itu dihadapkan kepada pilihan berbasis sosial atau ekonomi. Bagaimana pemerintah memastikan agar masyarakat itu sehat dan angka kematian menurun, dan disatu sisi memastikan pencegahan ekonomi tidak ‘down fall’. Hal ini mengartikan bahwa atensi terhadap isu pembangunan itu dari sisi ekonomi perlu menjadi perhatian, namun sistem kesehatan itu juga penting, sehingga yang paling tepat dilakukan oleh Pemerintah adalah memastikan prioritas pembangunan manusia yang berimplikasi terhadap ekonomi.

Disrupsi hadir di tengah konteks kebijakan dan governansi yang rapuh, ditunjukkan oleh berbagai fenomena empirik yang telah dijelaskan pada empat isu yang telah dibahas yaitu, 1) Teknologi, 2) Perubahan Iklim, 3) Geopolitik dan Geoekonomi, dan 4) Kesehatan. Hal menarik yang perlu dipelajari adalah keempat fenomena tersebut memberikan bukti bahwa pembuatan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kebijakan itu sendiri (dianggap sebagai tantangan internal), misalnya pada sangat dominannya kelompok kepentingan dalam suatu kebijakan. Terdapat tiga poin pendekatan dari para ahli yang menjadi titik tumpu melihat fenomena disrupsi dalam kebijakan dan governansi yaitu, 1) Advocacy Coalition Framework, 2) The politic of Bureaucracy, dan 3) Principle Agent Theory. Dalam pandangan Sabatier (1998) advocacy coalition framework, setiap aktor memiliki keyakinan inti kebijakan yang sama dan mengoordinasikan tindakan mereka dengan cara yang tidak sederhana untuk mempengaruhi sub-sistem kebijakan itu terbentuk. Lalu, pandangan Peter (2018) untuk the politic of bureaucracy, menganggap bahwa kebijakan selalu berakar dari politik.

Aspirasi dan pandangan yang membentuk kebijakan berasal dari politik. Para aktor yang terlibat dalam membentuk kebijakan disebut sebagai para politisi, sehingga kepentingan politik lebih mewarnai dibandingkan dengan logic dan evidence. Implikasinya adalah kebijakan dibuat mengarah pada keputusan yang terefleksi dalam arah politik. Dalam pandangan principal agent theory (Guston, 1996) dapat melihat kebijakan sebagai sebuah public service bargains –terdapat negosiasi dan traits, antara politisi dan birokrat disokong dengan nilai timbal balik. Relasi antara keduanya mendistorsi tujuan masing-masing. Sehingga, dari politisi terpilih tapi harus didukung dengan teknokrat-birokrat untuk mengeksekusi setiap janji politik kepada voters, tapi terdistorsi ketika birokrat tidak memiliki kompetensi. Kecenderungan ini melahirkan ‘self-benefit’ dari masing-masing aktor, birokrat yang cenderung sekedar mempertahankan posisi karir, atau politik juga memiliki agenda popularitas saja.

Ketiga pendekatan ini menunjukkan bahwa setiap aktor tidak dapat bertumpu sendiri, ada faktor interdependency yang terjadi dari para aktor dalam lingkup governansi, tentunya hal ini sangat bersinggungan dengan upaya membuat kebijakan yang tepat untuk mengatasi era disrupsi. Jika, infrastruktur kebijakan tidak memadai, dikarenakan relasi yang tidak kondusif dari setiap aktor pada akhirnya kebijakan yang dibuat tidak berjalan efektif. Sebaliknya jika infrastruktur memadai dan kondusif untuk para aktor maka kebijakan akan berjalan dengan baik.

Pada titik ini, etika memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan publik di era disrupsi sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Disrupsi baik yang disebabkan oleh kemajuan teknologi maupun penyebab lainnya telah menimbulkan tantangan yang kompleks sehingga membutuhkan pertimbangan etika yang mendalam dalam pelaksanaan governansi maupun pembuatan kebijakan publik.

Etika diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat atau kelompok tertentu, tetapi juga melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas. Kebijakan harus diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan memastikan akses yang adil terhadap manfaat disrupsi. Selain itu, disrupsi sering kali membawa tantangan etika baru, seperti hak privasi dalam era digital, implikasi etika dari kecerdasan buatan, dan lainnya. Karenanya, pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan implikasi moral dari teknologi baru dan inovasi dalam konteks sosial yang berubah.

Etika juga diharapkan dapat mendorong penilaian mendalam terhadap dampak sosial dari kebijakan. Pembuat kebijakan harus mempertimbangkan bagaimana kebijakan baru dapat mempengaruhi pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan aspek lain dari kehidupan masyarakat. Pembuat kebijakan juga perlu mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari kebijakan yang diambil. Keputusan yang diambil sekarang dapat memiliki dampak jangka panjang pada masyarakat, ekonomi, dan lingkungan.

### **Hadirin yang Saya muliakan,**

Intisari dalam pidato ini mengulas keterkaitan antara etika dengan tantangan kebijakan publik dan governansi di era disrupsi. Pada pendekatan perilaku secara filosofis, etika dapat dilihat melalui sejumlah pendekatan. Pada kesempatan ini setidaknya dua konsep atau pendekatan yang digunakan yaitu: 1) Etika utilitarianisme (Teleologi) dan 2) Etika Deantologi. Selain itu, akan disampaikan juga perkembangan etika pada zaman Romawi dan kerajaan Islam.

Etika utilitarianisme memungkinkan individu untuk memiliki preferensi moral dan bertindak demi kepentingan orang lain, ketika tindakan terhadap orang lain menghasilkan keuntungan bagi individu tersebut (Conway, 2013). Etika utilitarianisme memahami bahwa yang harus dipertimbangkan bukanlah motif keputusan kita, melainkan hasil yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan tindakan apa yang harus diambil (Koven, 2015). Hal ini mengartikan bahwa kita harus bertindak berdasarkan hasil yang terbaik bagi semua orang, yang paling baik bagi semua orang. Dalam pendekatan etika ini sangat memungkinkan mengorbankan beberapa hak beberapa individu demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya Pedoman agama memberikan aturan yang menentukan bagaimana bertindak.

Alternatif utama terhadap utilitarianisme adalah deontologi (Morrell dan Dahlmann, 2022). Pendekatan deontologis terhadap etika memandang moralitas sebagai suatu kewajiban, atau aturan moral yang harus dipatuhi. Etika deontologis adalah tentang mengikuti norma-norma universal yang menentukan apa yang harus dilakukan seseorang, bagaimana mereka harus berperilaku, dan apa yang benar atau salah. Ini adalah moralitas prinsip, bukan konsekuensi. Terlebih lagi, deontologi terletak pada akal budi, bukan pada perasaan yang memberi manfaat. Akal dianggap sebagai sumber aturan moral, yang diungkapkan melalui kehendak manusia. Dalam etika deontologis, masalah moral dianggap sebagai masalah rasional yang melibatkan pencarian aturan moral yang tepat.

Adapun ringkasan perkembangan etika yang berlangsung pada zaman kera-

jaan Romawi yang diintisarikan melalui tulisan Trapp (2017). Memahami Etika seperti terlebih dahulu mempelajari filsafat. Dalam konteks filsafat di bawah Kekaisaran Romawi, setidaknya dalam konteks Romawi, cenderung membatasi diri pada etika, dengan mengesampingkan atau merendahkan dimensi-dimensi lain secara ekstrim dan aktivitas filosofis. Filsafat gaya Romawi ‘dengan fokus kuat pada etika’. Kecenderungan ini diperkuat oleh perkembangan generasi Seneca, yang menghasilkan ‘keprihatinan obsesif dengan filsafat sebagai panduan praktis dalam kehidupan sehari-hari’. Bahkan di antara (yang dianggap) ‘ahli etika Romawi’, konsentrasi pada etika tidaklah lengkap atau eksklusif. Hasil karya filosofis Plutarch yang berjudul keseluruhan *Moralia* (Ethika), mencakup studi tentang kosmologi, teologi, dan sejarah alam, di samping karya-karya etis yang sebenarnya.

Sementara itu, ringkasan mengenai etika yang berlangsung sejak zaman kerajaan Islam diintisarikan melalui buku Koven (2015). Empat sumber etika memberikan panduan bagi umat Islam: Alquran, Sunnah, konsensus, dan analogi (Hunt, Crotty, dan Crotty 1991). Al-Qur’an mengadopsi sistem etika kesukuan sebelumnya yang menuntut kesetaraan, keramah-tamahan, dan keadilan. Sunnah atau kebiasaan Muhammad memberikan arahan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibahas dalam Al-Qur’an. Umat Islam juga dapat berkonsultasi berdasarkan konsensus yang telah diidentifikasi pada generasi sebelumnya. Ketika ketiga sumber ini gagal memberikan jawaban yang memadai terhadap pertanyaan moral, umat Islam dapat beralih ke analogi yang membangun kesejajaran antara Al-Quran atau Sunnah dan serangkaian keadaan baru.

Al-Qur’an diyakini oleh umat Islam sebagai firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dan merupakan pedoman perilaku etis yang paling pasti bagi umat Islam. Model perilaku etis adalah Muhammad, dan perilaku etis dikaitkan dengan kebajikan seperti kerendahan hati, kemiskinan, perilaku murah hati, kemuliaan, ketulusan, dan kebenaran. Etika Islam didasarkan pada tulisan Alquran dan tradisi Nabi Muhammad. Al-Quran menganjurkan agama tindakan, iman, dan perbuatan baik yang mencakup perilaku yang berasal dari niat baik. Tingkah laku dibagi menjadi lima golongan: (1) perbuatan yang diharamkan; (2) perbuatan yang diperintahkan; (3) perbuatan yang diperbolehkan; (4) perbuatan yang tidak disetujui, meskipun tidak secara jelas dilarang; dan (5) tindakan yang tidak diperbolehkan dalam ibadah formal (Becker dan Becker 1992). Agama Islam memberi penekanan khusus pada amalan-amalan yang diwajibkan seperti sedekah, puasa, haji, dan shalat. Kewajiban terpenting bagi umat Islam adalah beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang benar dan kepada



Muhammad sebagai nabinya.

Etika dipandang sebagai moral compass, jika menetapkan etika sebagai normatif, cocok dengan cara pandang etika dalam kajian perilaku yaitu deontologi atau utilitarianisme (teleologi). Etika sebagai virtue pada nilai suatu kebajikan. Terdapat dua kemungkinan simpulan yang diambil yaitu: 1) zaman kian berubah berubah, dan etika ‘memandu’ perubahan tersebut, sampai kearah kejayaan. Atau simpulan 2) zaman berubah, mereka hancur karena etika tidak lagi dipegang. Sehingga, etika tetap menjadi faktor keberhasilan setiap kebijakan dalam merespon setiap perkembangan zaman, tak terkecuali etika akan merespon era dirupsi yang direpresentasikan melalui tindakan dan lingkup governansi.

## Penutup

### Hadirin yang Saya muliakan,

Dalam konteks Indonesia, sepanjang pengalaman karir Saya sebagai dosen dan melaksanakan tri darma perguruan tinggi, terdapat tiga hal penting yang menjadi landasan pembuatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan besar negara ini dalam jangka panjang. Pertama, proses politik pembuatan kebijakan publik tidak boleh keluar dari tujuan besar sebuah kebijakan disusun. Sekalipun kebijakan ini sedikit banyak tidak sejalan dengan kepentingan kelompok yang menjadi influencer kebijakan. Sebab tidak ada pertarungan besar buat sebuah negara yang mengabaikan kepentingan besarnya hanya untuk memuluskan kepentingan kelompoknya saja. Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan pada tataran politik etikanya mengacu kepada kepentingan besar negara. Kedua, penyusun kebijakan harus berdiri diatas bukti yang benar, proporsional dan mencakup multidisiplin. Dengan demikian semua informasi, data, dan bahan untuk penyusunan kebijakan menjadi pertimbangan dan tidak ada pengabaian pada informasi sekecil apapun. Era dirupsi ditandai dengan terbukanya akses atas data dan informasi seluas mungkin yang kita kenal dengan “big data”. Namun, data selalu memiliki hukumnya sendiri “garbage in = garbage out”. Pada titik ini, memilih kebenaran data sekali lagi mengacu pada etika. Ketiga, kebijakan tidaklah didesain tanpa diimplementasikan. Dengan demikian, tujuan besar yang ada di kebijakan tidak boleh dikorup oleh implementasi yang salah. Masalah terbesar dalam proses governansi publik terletak pada munculnya discrepancy yang besar antara tujuan kebijakan yang ada di atas kertas dengan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, etika sekali lagi menjadi moral compass untuk memastikan tidak ada discrepancy kebijakan.

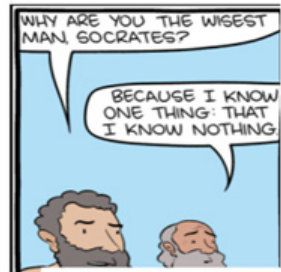
Bapak/Ibu sekalian, tidak ada satupun dari kita yang tidak berperan dalam proses governansi publik baik secara langsung maupun tidak langsung. Selama ini, mungkin kita hanya melihat peran besar hanya pada penyusun kebijakan. Tetapi sesungguhnya keberhasilan sebuah proses governansi publik membutuhkan tidak hanya penyusun kebijakan tetapi peran kita sebagai subyek kebijakan. Karenanya, etika tidak hanya menuntut pembuat kebijakan saja, tetapi juga kita semua dituntut untuk beretika.



Karikatur Oom Pasikom di harian Kompas Sabtu, 3 Juni 2017

KOMPAS/KARIKATUR GH SUGARTO

Mahkota seseorang adalah akalny. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. – Umar bin Khattab



"A man may die, nations may rise and fall, but an idea lives on."

JOHN F. KENNEDY

## Ucapan Terima Kasih

### Hadirin yang Saya muliakan,

Pada bagian akhir pidato pengukuhan ini, perkenankan Saya kembali mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena tanpa anugerah dan kuasa – NYA, tidak mungkin Saya berdiri pada hari ini menyampaikan pidato pengukuhan Guru Besar ini. Sebagai seseorang yang lahir dan besar di sebuah kawasan miskin Ibukota Jakarta, dan telah menjadi Yatim sejak kelas 4 SD dan Piatu sejak kelas 2 SMA, serta kemudian dapat melanjutkan kuliah di Universitas Ternama Negeri ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Apalagi kemudian Saya dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta berkarir menjadi Dosen di Almamater tercinta Universitas Indonesia. Tentu saja semua itu tidak akan pernah terwujud jika tidak karena anugerah dan kuasa Allah SWT.

Selain itu, perkenankan Saya untuk turut mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung perjalanan kehidupan Saya dan tentu saja perjalanan karir akademik Saya sebagai Dosen Tetap Universitas Indonesia sejak akhir 2003 hingga Saya berhasil mendapatkan Jabatan Akademik Tertinggi ini.

Pertama-tama Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih juga kepada Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang telah mendukung dan menyetujui usulan Guru Besar, sehingga Saya dapat menjadi Guru Besar dalam Bidang Public Governance atau Governansi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia terhitung sejak 1 Mei 2023.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D. beserta Para Wakil Rektor Universitas Indonesia yang telah memberikan dukungan dan persetujuan untuk mengusulkan saya sebagai Guru Besar pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia.

Selanjutnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, yang diketuai oleh Prof.

Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A., Ph.D. Ketua dan Anggota Dewan Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia yang diketuai Prof. Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu, M.Si yang telah menyetujui usulan Guru Besar Saya dan segala upaya dalam memperjuangkan usulan Guru Besar Saya ketika berproses di tingkat Universitas. Secara khusus kepada Prof. Amy dan juga keluarga beliau (Pak Djoko, Andi, Adit dan Bram), terima kasih Saya yang tak terhingga atas segala bantuan, dukungan dan pembelajaran yang diberikan kepada Saya sejak mahasiswa S1. Merupakan sebuah kehormatan dapat mengenal dan berinteraksi dengan Ibu dan keluarga ketika Saya mengikuti jenjang pendidikan S1.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M. dan segenap jajaran pimpinan fakultas Dr. Fibria Indriati, M.Si., Dr. Milla Sepliana Setyowati, M.S.Ak., dan Dr. Umanto Eko Prasetyo, M.Si. yang telah bekerja keras berjuang memfasilitasi untuk mengusulkan dan mengawal kenaikan jabatan fungsional Guru Besar Saya.

Kepada teman-teman SDM di Universitas Indonesia dan juga di Fakultas Ilmu Administrasi, terima kasih Saya yang tak terhingga atas bantuan, dukungan dan kerjasamanya dalam proses pengajuan usulan Guru Besar Saya. Terutama teman-teman SDM Fakultas dibawah arahan Wulandari Kartika Sari, S.Sos., M.Si dan koordinasi oleh Imas Cempaka Mulia, S.Sos., M.P.A., dan tentu saja Mas Haji Sarnan yang telah banyak memfasilitasi dan menginfokan perkembangan serta menindaklanjuti perbaikan dari usulan Guru Besar Saya. Semoga menjadi amal jariyah dan ladang pahala bagi Ibu/Bapak semua.

Cerita perjalanan karir Saya di Kampus Universitas Indonesia dimulai ketika Saya menjadi Panitia Mahasiswa dalam acara Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein pada Tahun 1995. Pada kegiatan tersebut, untuk pertama kalinya Saya bertemu dan berkenalan dengan 3 orang Senior Saya dari Angkatan 1990 yang pada saat itu merupakan dosen muda Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UI, yakni Prof. Dr. Eko Prasajo, Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, dan Drs. Azwar Hasan, M.P.A. Beliau bertigalah yang kemudian mengajak Saya untuk membantu mereka dalam mengelola Jurnal Bisnis & Birokrasi dan bahkan selanjutnya Saya dapat menjadi Asisten Mahasiswa pada Mata Kuliah Pemerintahan Daerah yang dikoordinir oleh Prof. Bhen. Karenanya pada kesempatan ini juga Saya ingin mengucapkan sebesar-besarnya terima kasih kepada Prof. Bhen (Alm), Prof. Eko, Prof. Irfan serta Mas Azwar yang karena kepercayaan beliau-beliau lah Saya dapat memulai pengabdian dan perjalanan

karir akademik di Universitas Indonesia.

Perjalanan selanjutnya Saya berinteraksi dengan para kolega Dosen termasuk yang berasal dari luar prodi seperti Dr. Titi Muswati Putranti, M.Si. Saya banyak berinteraksi dengan beliau dalam sejumlah aktivitas kegiatan kampus dimasa awal karir Saya terutama ketika menyelenggarakan untuk pertama kalinya kegiatan “Pajak Goes to Campus” oleh Direktorat Jenderal Pajak pada Tahun 2001 dan kemudian dalam sejumlah aktivitas lain. Karenanya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Titi atas semua bantuan, dukungan dan pembelajarannya. Saya turut mendoakan dan membantu sehingga Ibu dapat meraih jabatan akademik Guru Besar setelah ini.

Kepada para kolega dosen di Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, terima kasih Saya yang tak terhingga untuk semua hal selama Saya berkarir sebagai Dosen. Terutama kepada Drs. Muhamad Ridwansyah Anza, M.Si yang merupakan pembimbing kedua Saya pada saat menyelesaikan skripsi, terima kasih untuk segala bantuan dan dukungannya. Juga kepada Drs. Kusnar Budi, M.Bus. yang banyak sekali membantu dan mendukung diawal Saya berkarir. Kepada Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc. dan juga Dr. Lina Miftahul Jannah, S.Sos., M.Si yang telah memberikan Saya kesempatan untuk menjadi Ketua Program Studi S1 yang merupakan awal perjalanan Saya menjadi pengelola hingga saat ini. Kepada Dr. Muh Azis Muslim, S.Sos., M.Si sahabat Saya sejak kuliah atas persahabatan, dukungan, bantuan dan kerjasamanya selama ini. Saya selalu ingat masa-masa kuliah dimana Saya sering menginap di kost Bro Azis dan menggunakan berbagai fasilitas yang beliau miliki untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah. Kepada Dr. Achmad Lutfi, S.Sos., M.Si teman seangkatan Saya yang juga berkarir sebagai dosen. Terima kasih atas bantuan Pak Upi selama ini terutama dalam mendukung berbagai program selama Saya menjadi Ketua Departemen. Kepada Muhammad Imam Alfie Syarief Nasution, S.Sos., M.P.A. terima kasih yang tak terhingga atas dukungan dan kerjasamanya terutama atas dedikasinya sebagai Sekretaris Departemen. Sungguh luar biasa sekali upaya dan kerja Mas Alfie dalam melaksanakan tugas-tugas di Departemen. Saya sangat yakin dan percaya bahwa Mas Alfie adalah calon pemimpin Departemen di masa depan. Setelah masa tugas sebagai Sekretaris Departemen berakhir, Saya sangat mendukung Mas Alfie untuk melanjutkan studinya yang In shaa Allah di University of Melbourne. Selanjutnya kepada Dr.Phil. Reza Fathurahman, S.Psi., M.P.P., Zuliansyah Putra Zulkarnain, S.Sos., M.Si., dan juga Wahyu Mahendra, S.Sos., M.Egov. terima kasih atas semua dukungan dan kerjasamanya selama ini. Juga kepada kolega dosen lainnya di Departemen Ilmu Administrasi Negara yang tidak Saya sebutkan namanya. Selain itu ucapan terima kasih juga Saya

tujukan kepada teman-teman asisten dosen diantaranya Debie Puspasari, S.Sos., M.P.A., Marcel Angwyn, S.Sos., M.P.A., Syifa Amania Afra, S.I.A., Rainy Mu-tiara, S.I.A., Fitria Ariyanti, S.I.A. dan semua teman-teman asisten dosen lainn-ya di Departemen Ilmu Administrasi Negara yang tidak Saya sebutkan namanya atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. Khusus untuk Debie terima kasih atas bantuannya dalam mempersiapkan sejumlah hal untuk kegiatan Penguku-han hari ini.

Kepada kolega Dosen di Departemen Ilmu Administrasi Niaga dan De-partemen Ilmu Administrasi Fiskal yang tidak Saya sebutkan namanya, terima kasih atas pertemanan dan persahabatannya selama ini. Khusus kepada Prof. Dr. Gunadi, M.Sc., Akt. yang merupakan Ko-Promotor saya pada saat S3, terima kasih atas dukungan dan arahnya. Juga kepada Para Guru Besar FIA, Prof. Dr. Martani Huseini, M.B.A., Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.Si, dan Prof. Dr. Bernardus Yuliarto Nugroho, M.S.M. terima kasih atas dukungannya selama ini. Kepada Dr. Eko Sakapurnama, S.Psi., M.B.A. atas dukungan dan kerjasa-manya dalam sejumlah kegiatan. Dan tentu saja kolega Ketua Departemen, Dra. Novita Ikasari, M.Comm., Ph.D., dan Dr. Inayati, S.Sos., M.Si dan kolega Sek-retaris Departemen, Dra. Eva Anadayani, M.Si., dan Murwendah, S.Sos., M.A. atas pertemanan dan persahabatannya.

Untuk teman-teman Tenaga Kependidikan (Tendik) di Fakultas Ilmu Ad-ministrasi yang tidak Saya sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya selama ini. Terutama kepada teman-teman Tendik yang pernah membantu Saya ketika menjadi Sekretaris Program Pascasarjana, Alm Bang Rizal, Mba Ana, Mas Dodo, Mas Yanto, Mas Pri, Mas Muhayar, Pak Mustofa dan Bang Rohadi. Juga Mas Syamsul dan Tim Keamanan Kampus PGT, terima kasih banyak atas dukungan dan kerjasamanya. Juga teman-teman Tendik di Departemen Ilmu Administrasi Negara, Pak Joko, Mba Melin, Mba Indah dan Mba Paxia, terima kasih banyak untuk semua dedikasi dan kerjasa-manya. Selain itu juga kepada teman-teman Tendik di PPAA FIA, Pak Mailan, Mba Nur dan Mba Tuti, terima kasih untuk dukungan dan bantuannya. Kepada Tendik yang menjadi Panitia Pengukuhan Guru Besar saya, Mba Ghita, Mas David, Mba Alin dan Mas Rijal terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Untuk mas Rijal terima kasih untuk bantuannya dalam melayout pidato pen-gukuhan ini. Juga Mba Nisa dari Rispub FIA untuk bantuan dalam kegiatan riset dan pengmas Saya.

Kepada para mahasiswa terutama mahasiswa bimbingan saya di S1, S2 dan S3. Terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini. Juga secara khusus

bagi teman-teman mahasiswa yang hadir dan juga menjadi panitia pada Pengukuhan Guru Besar Saya hari ini.

Teman-teman seangkatan Saya selama bersekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3, terima kasih atas pertemanan, dukungan, kerjasama dan persahabatannya selama ini. Juga terima kasih secara khusus kepada teman-teman yang telah menyempatkan hadir pada kegiatan Pengukuhan Guru Besar Saya hari ini.

Pencapaian Saya saat ini juga tidak bisa dilepaskan dari jasa Guru-Guru Saya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Karenanya, pada kesempatan ini Saya juga menghaturkan banyak terima kasih kepada beliau-beli- au atas semua didikan, ilmu, pengetahuan, arahan dan wejangannya sehingga dapat membantu Saya untuk berkarir dan meraih Jabatan Akademik tertinggi ini. Secara khusus, terima kasih tak terhingga kepada Bapak/Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada kegiatan Pengukuhan Guru Besar Saya hari ini.

Kepada keluarga besar Hutan Organik Megamendung, Alm. Aki Bambang, Anin Rosita, Mas Akbar dan juga Mas Yuhan, terima kasih banyak atas pembelajarannya tentang Mencintai Alam kepada kami. Juga kepada teman-teman di Bumdes Megamendung Jaya dibawah pimpinan Kang Yusuf, terima kasih atas bantuan, kerjasama dan juga pembelajarannya. Juga kepada segenap warga di Kampung Sirnagalih-Cipendawa Megamendung terutama Pak RT Nasrul dan keluarga terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini. Juga kepada keluarga Alm. Bapak Sadikun di Cilincing dimana saya banyak menghabiskan waktu ketika saya SMA. Terima kasih untuk berbagai bantuan dan kerjasamanya.

Kepada keluarga besar Saya baik keluarga Alm. Madysari dan Alm. H. M.A. Kurdi Utomo dan Almh. Hj Halimah terima kasih atas doa, dukungan dan kerjasamanya selama ini. Terutama untuk keluarga Alm. Om Nurochim juga kepada kakak dan adik-adik saya serta semua keponakan dan cucu. Juga kepada Tante dan Om baik dari pihak Ibu maupun Bapak saya.

Kepada keluarga besar Kalosi, Enrekang, terima kasih yang tak terhingga untuk semua doa, dukungan dan kerjasamanya. Terutama kepada Ibu Mertua Saya Hajah Hawang Bandu untuk doa-doanya dan juga Bapak Mertua Alm. Abbas Maja, juga keluarga Gunuk, Kelapa Gading, Malang termasuk para keponakan dan cucu-cucu. Khusus kepada Widya terima kasih untuk bantuannya menyiapkan souvenir. Juga kepada Ata yang telah membantu kami selama ini

dalam mengawasi anak-anak, sehingga memudahkan kami ketika harus menjalankan tugas pekerjaan.

Perjalanan hidup Saya begitu berwarna dan In shaa Allah indah dan menyenangkan tidak lain karena kehadiran Istri Saya tercinta Epakartika dan juga anak-anak kami Muhammad Al Fatih Kurniawan dan Shalahuddin Al Ayyubi Kurniawan. Terima kasih untuk semua hal yang telah kita alami. Semoga kedepannya kita dapat semakin baik dan menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warrahmah, In shaa Allah.

Terakhir saya ingin ucapkan terima kasih kepada segenap handai taulan dan kerabat termasuk para Guru Besar Tamu serta Bapak/Ibu semua yang telah berkenan hadir dalam Upacara Pengukuhan Guru Besar Saya pada hari ini.

Demikianlah Pidato Pengukuhan Saya, terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu semua.

**Wabillahi Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.**

Balai Sidang UI Depok, 6 September 2023



## Daftar Pustaka

- Bailey, D., Crescenzi, R., Roller, E., Anguelovski, I., Datta, A., & Harrison, J. (2021). Regions in COVID-19 recovery. *Regional Studies*, 55(12), 1955-1965.
- Bauer, A., Feichtinger, J., & Steurer, R. (2012). The governance of climate change adaptation in 10 OECD countries: challenges and approaches. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 14(3), 279-304.
- Becker, L.C. and Becker, C. B. (1992). *Encyclopedia of Ethics*, vol. II, New York: Garland Publishing Inc
- Cleary, S. (2018). Governance in A Time of Disruption: Why the world needs a new consensus. In Vasbinder, J. W. *Disrupted Balance: Society at Risk*. Singapore: World Scientific Publishing. (pp. 39-46).
- Conway, P., & Gawronski, B. (2013). Deontological and utilitarian inclinations in moral decision making: a process dissociation approach. *Journal of personality and social psychology*, 104(2), 216.
- Food and Agriculture Organization. (2023). Food Price Index. Diunduh pada 22 Agustus 2023. Sumber: <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en/>
- Guston, D. H. (1996). Principal-agent theory and the structure of science policy. *Science and Public Policy*, 23(4), 229-240.
- Hunt, A.D., Crotty, M. T. and Crotty, R. B. (1991). *Ethics of World Religions*. San Diego, CA: Greenhaven Press
- Jagtap, S., Trollman, H., Trollman, F., Garcia-Garcia, G., Parra-López, C., Duong, L., ... & Afy-Sharah, M. (2022). The Russia-Ukraine conflict: Its implications for the global food supply chains. *Foods*, 11(14), 2098.
- Kostoff, R. N., Boylan, R., & Simons, G. R. (2004). Disruptive technology roadmaps. *Technological Forecasting and Social Change*, 71(1-2), 141-159.
- Koven, S. G. (2015). *Public sector ethics: Theory and applications*. CRC Press.
- Lawrence, M., Janzwood, S., & Homer-Dixon, T. (2022). What is a global poly-crisis. Cascade Institute, Technical Paper, 4.
- Melnyk, L. H., Dehtyarova, I. B., Dehtiarova, I. B., Kubatko, O. V., & Kharchenko, M. O. (2019). Economic and social challenges of disruptive technologies in conditions of industries 4.0 and 5.0: the EU Experience. *Mechanism of Economic Regulation*, 4, 32-42
- Mickoleit, A. (2014), "Social Media Use by Governments: A Policy Primer to Discuss Trends, Identify Policy Opportunities and Guide Decision Makers", OECD Working Papers on Public Governance, No. 26, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/5jxrcmghmk0s-en>
- Morrell, K., & Dahlmann, F. (2022). Aristotle in the Anthropocene: The com-

- parative benefits of Aristotelian virtue ethics over Utilitarianism and deontology. *The Anthropocene Review*, 20530196221105093.
- Muchtar, A. dkk. (2022). Review: Krisis Pangan Dunia dan Indonesia. Prosiding Seminar Nasional BSKJI “Post Pandemic Economy Recovery”. Samarinda
- Peters, B. G. (2018). *The politics of bureaucracy: An introduction to comparative public administration*. Routledge.
- Plekhanov, D., Franke, H., & Netland, T. H. (2022). *Digital transformation: A review and research agenda*. *European Management Journal*, Article in Press.
- Sabatier, P. A. (1998). The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe. *Journal of European public policy*, 5(1), 98-130.
- Sood, A., & Tellis, G. J. (2011). Demystifying disruption: A new model for understanding and predicting disruptive technologies. *Marketing Science*, 30(2), 339-354.
- Steffen, W., Rockström, J., Richardson, K., Lenton, T. M., Folke, C., Liverman, D., ... & Schellnhuber, H. J. (2018). Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(33), 8252-8259.
- The World Bank. (2018). Diunduh pada 23 Agustus 2023. Sumber: <https://www.worldbank.org/en/events/2018/05/15/states-of-disruption>
- The World Economic Forum. (2023). *The Global Risk Report 2023*. Diunduh pada 22 Agustus 2023. Sumber: <https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/>
- Torfin, J. (2023). *Rethinking Public Governance*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Trapp, M. (2017). *Philosophy in the Roman Empire: ethics, politics and society*. Routledge.
- <https://dataindonesia.id/>
- <https://news.detik.com/kolom/d-5883436/belajar-dari-fenomena-no-viral-no-justice>
- <https://www.insiderintelligence.com/content/top-10-countries-where-people-spend-most-time-on-social-media>
- <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/13/03/2023/ketika-fenomena-no-viral-no-justice-dianggap-alat-mencari-keadilan>
- <https://online.maryville.edu/blog/a-guide-to-social-media-activism>
- <https://www.oecd.org/digital/digital-government/social-media-in-risk-and-crisis-communication.htm>
- <https://www.simplilearn.com/real-impact-social-media-article>
- <https://thedocs.worldbank.org/>
- <https://timesindonesia.co.id/kopi-times/460758/fenomena--no-viral-no-justice->

-dan-transformasi-keadilan-di-indonesia

<https://www.unicef.org/indonesia>

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1614040-jaksa-agung-singgung-pengakuan-hukum-no-viral-no-justice>

<https://wellcome.org/news/equality-global-poverty-how-covid-19-affecting-societies-and-economies>

## Riwayat Hidup



### 1. Informasi Umum dan Keluarga

Nama Lengkap	: Prof. Dr. Teguh Kurniawan, S.Sos., M.Sc.
NIP	: 197606262010121001
Pangkat, Golongan	: Pembina, IV-a
Jabatan Akademik	: Guru Besar bidang Public Governance (Governansi Publik), <b>Angka Kredit: 1.122</b>
Tempat, Tanggal Lahir	: Jakarta, 26 Juni 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Orang Tua	: Ayah : H. Muhammad Adhang Kurdi Utomo (Alm) Ibu : Hj. Halimah (Almh)
Istri	: Epakartika, S.Pi., M.E., M.H.
Anak	: Muhammad Al Fatih Kurniawan Shalahuddin Al Ayyubi Kurniawan
Saudara Kandung	: Esti Kurniati (Kakak) Erie Kurniasih (Adik) Rini Kurniatun, S.Pd. (Adik)

### 2. Pendidikan Formal yang Ditamatkan

1982	: TK PGRI Anak Cabang Cilincing, Jakarta Utara
1988	: SD Negeri Cilincing 09 Pagi, Jakarta Utara
1991	: SMP Negeri 143, Cilincing, Jakarta Utara
1994	: SMA Negeri 52, Cilincing, Jakarta Utara,

	Jurusan Biologi
2000	: S1-Sarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
2003	: S2-Master of Science dalam bidang Urban Environmental Management, Wageningen University & Institute for Housing and Urban Development Studies, Belanda
2017	: S3-Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia

### 3. Riwayat Jabatan Fungsional

1 Desember 2003	: Pengajar
1 Mei 2006	: Asisten Ahli, Angka Kredit: 193,5
1 Oktober 2007	: Lektor, Angka Kredit: 214,5
1 April 2010	: Lektor Kepala, Angka Kredit: 419,08
1 September 2010	: Lektor Kepala, Pembebasan Sementara karena Tugas Belajar
1 September 2012	: Lektor Kepala, Penyesuaian setelah menjadi PNS
1 November 2017	: Lektor Kepala, Pengaktifan Kembali setelah Tugas Belajar
1 Mei 2023	: Guru Besar, Angka Kredit: 1.122

### 4. Riwayat Status Pegawai, Pangkat dan Golongan

1 Desember 2003	: Pengangkatan Pegawai UI-BHMN, setara Golongan III-b
1 Oktober 2007	: setara Golongan III-c
1 Oktober 2010	: setara Golongan III-d
1 Desember 2010	: Pengangkatan CPNS, Golongan III-b
1 Juli 2012	: Pengangkatan PNS, Penata Muda Tk I, Golongan III-b
1 Oktober 2014	: Penata, Golongan III-c
1 April 2018	: Penata Tk I, Golongan III-d
1 April 2020	: Pembina, Golongan IV-a

### 5. Riwayat Penugasan Struktural

2005	: Sekretaris Eksekutif Selo Soemardjan Research Center, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
2013 – 2016	: Ketua Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Program Sarjana Reguler dan Paralel, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia
2015 – 2016	: Penanggung Jawab Kemahasiswaan, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Indonesia
2016 – 2017	: Kepala Unit Penjaminan Mutu Akademik dan Satuan

	Pengawas Internal, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Indonesia
2017 – 2021	: Sekretaris Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Indonesia
2021 – sekarang	: Ketua Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi (FIA), Universitas Indonesia

## 6. Penugasan sebagai Asesor / Reviewer / Sejenis yang masih aktif

2019 – sekarang	: Reviewer Akademis Beasiswa LPDP
2021 – sekarang	: Asesor Badan Akreditasi Nasional – Perguruan Tinggi (BAN-PT)
2021 – sekarang	: Anggota Komite Etika Penelitian (KEP) LPEM FEB UI
2022 – sekarang	: Country Expert FIBAA

## 7. Aktivitas Penelitian yang saat ini berjalan

Kegiatan penelitian yang saat ini sedang dijalankan bersama tim merupakan bagian dari Proyek Penelitian “Governing Co-Created Green Transitions (Gogreen Project)” yang dipimpin oleh Prof. Jacob Torfing (Roskilde Universiteit, Denmark). Proyek Penelitian ini mengangkat 35 kasus yang dikerjakan oleh 53 peneliti dari 27 negara.

- Hibah PUTI Q1 Tahun 2022: “Co-creation dalam Model Collaborative Governance untuk Implementasi SDG Hijau di Indonesia”
- Hibah PUTI Q1 Tahun 2023: “The Inter-Scalar Dynamics of Mangrove Conservation and Restoration”

## 8. Organisasi Profesi yang diikuti

- The International Behavioural Public Policy Association
- Public Administration Theory (PAT) Network
- Association for Practical and Professional Ethics (APPE)
- Indonesian Qualitative Researcher Association (IQRA)
- Indonesian Association for Public Administration (IAPA)
- Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA)
- Asian Association for Public Administration (AAPA)

## 9. Penghargaan

2018	: Dosen Berprestasi FIA UI
2019	: Juara 3 Dosen Berprestasi UI Kategori Sosial Humaniora
2021	: Sitasi Terbanyak di Scopus, Dies Natalis ke- 6 FIA UI
2022	: Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun

## 10. Publikasi Terindeks Scopus

Teguh Kurniawan, Eko Prasajo, Gunadi. (2017).“Corruptive behavior of the heads of local governments in Indonesia”Halduskultuur, Volume 18, No. 1, pp. 73-87

Teguh Kurniawan, Fibria Indriati. (2017).“Introduction: Collaborative governance in dynamic public-private-society relations to achieve sustainable development goals”Development and Society, Volume 46, No. 3, pp. 421-426

Teguh Kurniawan, Muh A. Muslim, Eko Sakapurnama. (2018).“Regulatory impact assessment and its challenges: An empirical analysis from Indonesia”Kasetsart Journal of Social Sciences, Volume 39, No. 1, pp. 105-108

Givo Aulia, Teguh Kurniawan. (2018).“The Implementation of Open Data Program in the Special Capital Region (DKI) of Jakarta Province”3rd International Conference on Sustainable Information Engineering and Technology, SIET 2018 – Proceedings, pp. 96-100

Teguh Kurniawan (2018). “The future of climate change policy by provincial government in Indonesia: A study on the vision and mission of elected governors in 2017 election”IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 129, No. 1, pp. 012039

Dian E. P. Lestari, Teguh Kurniawan. (2018).“Community participation in upgrading slum area: Study of the implementation of Kampung Deret in Petogogan, Jakarta” IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 179, No. 1, pp. 012032

Teguh Kurniawan. (2018).“Combating climate change through community participation in preserving the environment” A case from Hutan Organik (Organic Forest) in Megamendung, Bogor Regency, Indonesia”IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 179, No. 1, pp. 012033

Teguh Kurniawan, Ima Mayasari, Ummiah S. Prasajo. (2018).“Private forest as a model in critical land reconstruction in upstream area, Indonesia”.IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 200, No. 1, pp. 012051

Kamilia Q. Ain, Muhamad A. Nasri, Muhammad N. Alamsyah, Muhammad D. R. Pratama, Teguh Kurniawan. (2021). “Collaborative governance in managing plastic waste in Bali”.IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 905, No. 1, pp. 012115

Teguh Kurniawan. (2022).“Discretion as a Factor in Corruption: A Case from Indonesia”Public Integrity, Volume 24, No. 7, pp. 692-701

Dian A. Puspitasari, Teguh Kurniawan. (2023).“Assesing the national complaint handling system in Indonesia (LAPOR!) using the design-reality gap model”.International Journal of Electronic Governance, Volume 15, No. 2, pp. 118-134



